

## 70.665 KELUARGA BOYOLALI TERIMA BANSOS BERAS MULAI JUMAT, TERBANYAK DI ANDONG



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/09/bansos-beras.jpg>

### Isi Berita:

Solopos.com, BOYOLALI — Sebanyak 70.665 keluarga di Boyolali segera menerima bantuan sosial atau bansos beras cadangan pangan pemerintah. Dari puluhan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan beras itu, terbanyak di Kecamatan Andong yakni 5.090 KPM.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Boyolali, Bambang Jiyanto, menjelaskan data penerima bansos beras tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masing-masing KPM akan menerima bantuan beras selama tiga bulan yaitu September, Oktober, dan November.

Setiap bulannya, mereka menerima 10 kilogram (kg) beras. Bambang menjelaskan ini adalah bansos beras tahap II. Untuk bansos beras tahap I telah disalurkan pada Mei, Juni, dan Juli. Pada tahap I, ada 75.010 KPM yang masing-masing menerima beras 10 kg/bulan.

“Hari ini belum tersalurkan karena kami masih berkoordinasi. Jumlahnya sangat banyak di 22 kecamatan dan 267 desa atau kelurahan,” kata dia saat ditemui wartawan di kantornya, Kamis (14/9/2023).

Bambang menyebut DKP Boyolali hanya bertugas mendampingi sedangkan penyaluran bansos beras dilakukan langsung dari Bulog ke masyarakat lewat transporter yaitu Jasa Prima Logistik (JPL).

Bambang menjelaskan sebelum beras disalurkan dari Bulog ke warga, DKP mengecek terlebih dahulu di gudang Bulog di Sukoharjo dan Klaten. DKP Boyolali telah mengecek tersebut pada Rabu (13/9/2023).

Ia membeberkan beras yang akan dibagikan kepada warga itu berkualitas medium akan tetapi bagus. Berbeda dengan penyaluran bantuan beras tahap I, pada tahap II ini undangan penerima bansos akan diberikan barcode.

Akan ada petugas dari JPL dibantu dari pihak desa atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Mengingat personel DKP Boyolali yang terbatas, jelas Bambang, petugas dari dinas hanya akan memantau di beberapa lokasi.

### **Menjaga Stabilitas Harga Beras**

“Bantuan cadangan ini niatnya untuk meringankan KPM agar bisa memperoleh beras untuk kebutuhan makan selama tiga bulan. Kemudian juga untuk menepati istilahnya tugas pemerintah untuk menjaga stabilitas harga karena saat ini memasuki El Nino, musim kering,” jelas dia.

Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan Distribusi dan Cadangan Pangan DKP Boyolali, Dhian Mujiwiyati, menambahkan pengiriman beras bansos itu akan dimulai selama enam hari kerja dimulai pada Jumat (15/9/2023).

Nantinya beras dari Bulog akan dikirimkan oleh transporter ke masing-masing desa. Kemudian, pemerintah desa akan mengundang KPM agar datang ke balai desa.

“Biasanya disimpan di aula desa dulu, setelah diterima oleh pihak desa baru nanti biasanya satu hari atau dua hari setelahnya mengundang KPM untuk bisa mengambil satu per satu,” kata dia.

Berdasarkan data dari DKP Boyolali, jumlah penerima bansos terbanyak berada di Kecamatan Andong dengan 5.090 KPM.

Berikut perincian jumlah penerima bansos beras di masing-masing kecamatan Kabupaten Boyolali:

- Ampel: 2.498 KPM
- Andong: 5.090 KPM
- Banyudono: 2.941 KPM
- Boyolali: 2.947 KPM
- Cepogo: 4.682 KPM
- Gladagsari: 2.184 KPM
- Juwangi: 2.186 KPM
- Karanggede: 4.006 KPM
- Kemusu: 2.913 KPM
- Klego: 4.046 KPM
- Mojosongo: 3.439 KPM
- Musuk: 2.473 KPM
- Ngemplak: 3.951 KPM
- Nogosari: 4.363 KPM

- Sambi: 3.877 KPM
- Sawit: 2.158 KPM
- Selo: 2.688 KPM
- Simo: 3.598 KPM
- Tamansari: 1.756 KPM
- Teras: 2.285 KPM
- Wonosamodro: 2.768 KPM
- Wonosegoro: 3.806 KPM

**Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/70-665-keluarga-boyolali-terima-bansos-beras-mulai-jumat-terbanyak-di-andong-1741302>, “70.665 Keluarga Boyolali Terima Bansos Beras Mulai Jumat, Terbanyak di Andong”, tanggal 14 September 2023.
2. <https://www.antaraneews.com/berita/3726699/pemkab-boyolali-salurkan-bantuan-beras-tahap-ii-untuk-70665-kpm>, “Pemkab Boyolali salurkan bantuan beras tahap II untuk 70.665 KPM”, tanggal 14 September 2023.

**Catatan :**

- Untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat, perlu penyaluran cadangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan. pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat.<sup>1</sup>
- Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.<sup>2</sup>
- Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Badan Pangan Nasional No. 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, bagian Konsideran

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3

- Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.<sup>4</sup>
- Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangandilakukan untuk mengatasi:<sup>5</sup>
  - a. Kekurangan Pangan;
  - b. Gejolak harga Pangan;
  - c. Bencana alam;
  - d. Bencana sosial; dan/atau
  - e. Keadaan Darurat
- Penerima Bantuan Pangan terdiri dari:<sup>6</sup>
  - a. Masyarakat miskin; dan/atau
  - b. Masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi
- Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi:
  - a. Beras
  - b. Bawang
  - c. Cabai
  - d. Daging ungags
  - e. Telur ungags
  - f. Daging ruminansia
  - g. Gula konsumsi
  - h. Minyak goreng; dan/atau
  - i. Ikan kembung
- Dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, Badan Pangan Nasional dapat menugaskan:<sup>7</sup>
  - a. Perum BULOG; dan /atau
  - b. BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan
- Pendanaan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan bersumber pada:<sup>8</sup>
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 9

- Pemantauan dan evaluasi penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Salah satu dari Tim tersebut antara lain: organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang sosial/pangan/pertanian.

Berdasarkan artikel tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Boyolali bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, menyalurkan bantuan cadangan beras tersebut sebagai salah satu langkah untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Sebanyak 70.665 keluarga di Boyolali segera menerima bantuan sosial atau bansos beras cadangan pangan pemerintah. Dari puluhan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan beras itu, terbanyak di Kecamatan Andong yakni 5.090 KPM.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Boyolali, Bambang Jiyanto, menjelaskan data penerima bansos beras tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masing-masing KPM akan menerima bantuan beras selama tiga bulan yaitu September, Oktober, dan November.

Setiap bulannya, mereka menerima 10 kilogram (kg) beras. Bambang menjelaskan ini adalah bansos beras tahap II. Untuk bansos beras tahap I telah disalurkan pada Mei, Juni, dan Juli. Pada tahap I, ada 75.010 KPM yang masing-masing menerima beras 10 kg/bulan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*